

Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 di Kabupaten Berau

Dheandra Ayu Rizkiani Shakina¹, Septia Mitha Caesaria², Putri Nur Hidayanti Nasution³,
Noraini Fairuth Mutiah⁴

Telkom University

E-mail: dheandraarys@student.telkomuniversity.ac.id¹, mithacaesaria@student.telkomuniversity.ac.id²,
putrinurhdayanti@student.telkomuniversity.ac.id³, mutiah@student.telkomuniversity.ac.id⁴

Article History:

Received: 10 Juni 2023

Revised: 15 Juni 2023

Accepted: 16 Juni 2023

Keywords: Respon, bantuan langsung tunai, pandemi COVID-19, masyarakat, pendataan, validitas data.

Abstract: Penelitian ini menganalisis respon masyarakat terhadap bantuan langsung tunai (BLT) pemerintah selama pandemi COVID-19 di Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif digunakan, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara terhadap responden yang terdampak, seperti yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan menurun. Hasil penelitian menunjukkan respon yang beragam terhadap BLT. Meskipun sebagian merasa terbantu dan menganggapnya langkah positif dalam mengatasi dampak ekonomi, ada yang merasa BLT tidak tepat sasaran dan hanya sebagian kecil masyarakat yang mendapat bantuan. Faktor-faktor seperti pendataan yang kurang maksimal, pemalsuan data, dan penyalahgunaan BLT memengaruhi respon masyarakat. Dampak pandemi terhadap kesehatan mental dan ekonomi juga memengaruhi respon terhadap bantuan. Rekomendasi penelitian ini adalah meningkatkan efektivitas pendataan, validitas data, dan mekanisme penyaluran bantuan agar tepat sasaran. Pemerintah perlu memberikan pelayanan optimal dan memperhatikan kebutuhan masyarakat selama pandemi.

PENDAHULUAN

Respon merupakan kegiatan yang dilakukan oleh individu yang tidak hanya menimbulkan kesan positif, tetapi juga dapat memberikan tanggapan yang membangun berupa kritik dan saran yang disampaikan kepada komunikator melalui komunikasi. Respon dalam komunikasi adalah kegiatan komunikatif yang dilakukan oleh komunikator dan komunikan yang menghasilkan suatu hasil yang disebut respon. Dalam proses komunikasi awal, individu melakukan lebih dari sekedar menerima tanggapan terhadap rangsangan yang dihasilkan di lingkungan. Komunikasi antar manusia merupakan kajian integral dalam aktivitas kehidupan manusia. Konsep definisi komunikasi Schramm mengarah pada evektifitas komunikasi antara orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi Schramm melihat sebuah komunikasi yang efektif adalah komunikasi

yang berhasil melahirkan kebersamaan (*commonness*), kesepahaman antara sumber (*source*) dengan penerima (*audience*)-nya. Sehingga komunikasi yang efektif jika *audience* menerima pesan yang sama seperti yang ingin dicapai oleh pengirim pesan (Suherman, 2020).

Respon yang dimaksud disini adalah respon masyarakat terhadap bantuan langsung tunai dari pemerintah selama pandemi COVID-19 di Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Pembagian bantuan langsung tunai (BLT) dari pemerintah sebagai kompensasi kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dianggap tidak merata. Sebabnya masih ada beberapa warga yang masuk kategori tak mampu yang luput dari sasaran bantuan yang disalurkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos). Khususnya untuk warga RT 15 Kelurahan Gunung Tabur, pendataan warga yang berhak mendapatkan BLT dianggap tidak maksimal. Sebab terdapat beberapa warga yang tidak termasuk sebagai penerima bantuan, walaupun dalam program bantuan pemerintah sebelumnya warga tersebut selalu menjadi sasaran penerima.

Bantuan Langsung Tunai (BLT) merupakan sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin. BLT merupakan implementasi dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2008 tentang pelaksanaan program bantuan langsung tunai (BLT) untuk rumah tangga sasaran (RTS) dalam rangka kompensasi pengurangan subsidi BBM. Program BLT ini dibuat sebagai pengganti kenaikan biaya hidup ketika terjadi kenaikan harga BBM, sehingga besaran BLT dihitung sebagai biaya kenaikan hidup penduduk miskin yang disebabkan oleh kenaikan harga (inflasi) yang diakibatkan langsung maupun tidak langsung oleh kenaikan harga BBM. Program BLT ini memberikan dua efek positif, pertama yaitu untuk menambah daya beli rakyat miskin yang pendapatnya di bawah rata-rata. Kedua, untuk memberikan dana ke daerah dengan kemiskinan tinggi untuk menghidupkan daya beli yang relatif rendah. Sejatinya, adanya program BLT ini bertujuan sebagai salah satu upaya pemberantasan kemiskinan di Indonesia, namun program ini dirasa kurang efektif. Selain fungsi yang sering kali disalahgunakan, validitas data masyarakat miskin yang diragukan juga berdampak pada sasaran pemberian data BLT kepada masyarakat yang berhak menerima. Namun sering kali data tersebut dipalsukan sehingga bukan orang miskin yang menerima, melainkan siapa saja dapat menerima (Akib & Risfaisal, 2016).

Pemerintah seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui kinerja dan pengabdian kepada negara untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintahan dibentuk tidak hanya untuk melayani dirinya sendiri sebagai pejabat namun pemerintah dituntut untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tujuan memberikan kesejahteraan dan meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya negara. Pandemi COVID-19 membuat perekonomian Indonesia melemah yang berakibat pada hilangnya pekerjaan dan penghasilan masyarakat. COVID-19 merupakan virus jenis baru yang penyebarannya hampir sama seperti SARS, namun belum diketahui penyebab dan obatnya. Hampir semua negara di dunia terpapar virus COVID-19 yang membuat masyarakat menjadi kesusahan.

Pemerintah melakukan berbagai upaya agar penyebaran virus COVID-19 ini segera berakhir. Kesehatan yang menurun, perekonomian juga menurun drastis karena adanya *lockdown* di beberapa kota besar di Indonesia. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengantisipasi kemiskinan baru yaitu adanya Bantuan Tunai Langsung (BLT). Bantuan ini memberikan respon positif di kalangan masyarakat. Namun, tidak sedikit juga masyarakat yang beranggapan bahwa BLT ini dirasa tidak tepat sasaran dan hanya sebagian kecil masyarakat yang memperoleh bantuan.

LANDASAN TEORI

Menurut Djalaludin Rakhmat (1999:51), respon adalah suatu kegiatan (activity) dari organisme itu bukanlah semata-mata suatu gerakan yang positif, setiap jenis kegiatan yang ditimbulkan oleh suatu perangsang dapat juga disebut respon. Secara umum respon atau tanggapan dapat diartikan sebagai hasil atau kesan yang didapat (ditinggal) dari pengamatan tentang subjek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan-pesan.

Menurut *World Health Organization* (2020), *Corona Virus Disease 2019* atau yang biasa dikenal dengan Covid-19, merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang dan biasa dikenal dengan sindrom pernapasan akut parah virus corona 2 (SARS-CoV-2). Covid-19 mewabah di banyak negara secara global hingga menyebabkan pandemi dari tahun 2020 – 2022. Pandemi yang terjadi membuat pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Kemenko PMK, PSBB merupakan salah satu strategi Pemerintah dalam menekan penyebaran Covid-19.

Pemerintah menurut Sumaryadi (2010:18), bahwa; “secara umum pemerintah dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki; a) Otoritas yang memerintah dari suatu unit politik. b) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political will) c) Aparatur yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan. d) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundangundangan untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dan dengan monopoli atas kekuasaan yang sah.

Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Hibah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah maupun barang dan atau jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.

Menurut Fidyatun (2011) PKH adalah program yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yang telah ditetapkan sebagai peserta PKH. Peserta tersebut merupakan masyarakat yang masuk ke dalam kriteria RTSM yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan memiliki tanggungan ibu hamil, bayi usia di bawah 5 tahun, dan tanggungan anak Sekolah Dasar (SD)/sederajat sampai dengan tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)/sederajat di dalam satu rumah tangga.

Selviana, Irwan Akib, Risfaisal Vol.3 No.2 (2016) Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat dipahami sebagai pemberian sejumlah uang (dana tunai) kepada masyarakat miskin setelah pemerintah memutuskan untuk menaikkan harga BBM dengan jalan mengurangi subsidi namun selisih dari subsidi itu diberikan kepada masyarakat miskin.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan Dalam penelitian ini, deskripsi mendalam penelitian kualitatif. Metode ini adalah tipe Metode yang menggunakan subjek dan tanpa objek Ada karya. penelitian sesuai dengan Hasil yang diperoleh peneliti di lapangan Wawancara sebagai teknik pengumpulan data, Bukan plus bukan minus informasi teknik, metode ini untuk penelitian tanggapan masyarakat Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Selama Pandemi COVID-19 di Kabupaten Berau. Memahami topik dan mata pelajaran yang ditugaskan Melakukan wawancara dengan responden Berdasarkan mereka yang terkena PHK, masyarakat tanpa pendapatan selama

pandemi dan miskin baru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pandemi COVID-19 telah memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat dan pegawai. Ketika krisis kesehatan global ini terjadi, banyak sektor ekonomi mengalami penurunan drastis, penutupan usaha, dan pemutusan hubungan kerja massal. Hal ini berdampak langsung pada masyarakat dan pegawai, yang harus menghadapi tantangan ekonomi, sosial, dan emosional yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Banyak perusahaan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi. Ini berarti banyak pegawai kehilangan pekerjaan mereka, menghadapi ketidakpastian ekonomi, dan kesulitan mencari pekerjaan baru. Mereka harus berjuang dengan mencari sumber penghasilan alternatif dan mengatasi tekanan finansial yang timbul akibat kehilangan pekerjaan. Banyak masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan atau kehilangan penghasilan secara keseluruhan selama pandemi. Bisnis yang terpaksa ditutup atau mengurangi operasionalnya menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan atau mengalami pemotongan gaji. Akibatnya, masyarakat menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan pendidikan, serta menghadapi risiko kemiskinan.

Pandemi juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kesehatan mental dan emosional masyarakat dan pegawai. Isolasi sosial, kecemasan akan kesehatan, kehilangan pekerjaan, dan ketidakpastian masa depan semuanya dapat menyebabkan tekanan mental yang berat. Stres, kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya menjadi lebih umum di kalangan masyarakat yang terdampak.

Selama pandemi, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai regulasi guna mengatasi dan mengendalikan penyebaran virus COVID-19 serta dampaknya terhadap masyarakat dan ekonomi. Regulasi ini bertujuan untuk melindungi kesehatan dan keselamatan publik, memastikan keberlangsungan aktivitas ekonomi, serta memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terdampak.

Salah satu regulasi yang diterapkan adalah Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang membatasi mobilitas masyarakat dan aktivitas sosial guna mengurangi risiko penularan virus. PSBB melibatkan penutupan sementara sejumlah tempat umum seperti sekolah, tempat ibadah, mal, restoran, serta pembatasan pada perjalanan antar wilayah. Regulasi ini diterapkan dengan tujuan menjaga jarak fisik, membatasi kerumunan, dan meminimalkan interaksi sosial yang dapat mempercepat penyebaran virus.

Selain PSBB, pemerintah juga menerapkan kebijakan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) yang memberlakukan jam malam atau pembatasan waktu tertentu bagi kegiatan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mengurangi risiko penularan virus di tempat-tempat keramaian pada jam-jam tertentu yang dianggap rentan.

Regulasi lain yang diterapkan adalah kewajiban penggunaan masker di tempat umum dan fasilitas umum. Masyarakat diwajibkan untuk menggunakan masker sebagai salah satu langkah pencegahan penularan virus. Selain itu, diberlakukan pula protokol kesehatan seperti mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, menjaga jarak fisik, serta menghindari kerumunan.

Dalam upaya melindungi kesehatan masyarakat, pemerintah juga mengintensifkan kegiatan tes, lacak, dan isolasi (TLI). Hal ini dilakukan untuk mendeteksi kasus COVID-19 lebih cepat, melakukan *tracing* kontak erat dengan kasus positif, serta mengisolasi dan merawat pasien yang terinfeksi virus. Selain itu, pemerintah juga meningkatkan kapasitas rumah sakit dan

fasilitas kesehatan, termasuk penyediaan alat kesehatan dan perlindungan bagi tenaga medis.

Dalam konteks ekonomi, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan stimulus ekonomi guna meringankan beban ekonomi masyarakat dan menjaga kelangsungan usaha. Kebijakan ini antara lain meliputi bantuan langsung tunai bagi masyarakat terdampak, perlindungan bagi pekerja terkena PHK, relaksasi pajak dan kredit, serta program pemulihan ekonomi melalui sektor-sektor strategis.

Selain itu, pemerintah juga mengeluarkan regulasi untuk memfasilitasi peralihan kegiatan ekonomi ke ranah digital, seperti peningkatan penggunaan *e-commerce*, layanan pengiriman makanan, dan pembayaran digital. Regulasi ini bertujuan untuk mengurangi kontak fisik serta mempromosikan inovasi dan transformasi digital dalam dunia usaha.

Regulasi yang diterapkan selama pandemi ini bertujuan untuk mengendalikan penyebaran virus, melindungi kesehatan dan keselamatan masyarakat, serta menjaga keberlangsungan ekonomi. Meskipun beberapa regulasi dapat memberikan dampak ekonomi dan sosial yang signifikan, langkah-langkah ini diambil untuk menghadapi situasi darurat dan perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan sesuai dengan perkembangan situasi pandemi guna mencapai keseimbangan antara kesehatan dan kelangsungan industri.

Dalam hal perlindungan sosial, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk program bantuan sosial bagi masyarakat yang terdampak secara ekonomi, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan Program Kartu Prakerja. Program-program ini memberikan bantuan finansial, pelatihan, dan dukungan lainnya kepada masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah melalui Program Bansos Tunai. Program ini bertujuan untuk memberikan bantuan tunai kepada keluarga yang terkena dampak langsung pandemi COVID-19. Bantuan tunai ini diberikan dengan harapan dapat membantu keluarga-keluarga tersebut memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari yang mungkin terganggu akibat situasi ekonomi yang sulit.

Melalui Program Bansos Tunai, pemerintah memberikan bantuan tunai kepada keluarga-keluarga penerima yang telah ditentukan berdasarkan kriteria tertentu, seperti pendapatan rendah atau terdampak langsung oleh penurunan aktivitas ekonomi. Bantuan tunai tersebut dapat digunakan oleh penerima untuk memenuhi berbagai kebutuhan seperti makanan, obat-obatan, pembayaran tagihan, dan kebutuhan sehari-hari lainnya.

Program ini memiliki beberapa manfaat penting bagi masyarakat dan pegawai yang terdampak. Pertama, bantuan tunai memberikan dukungan finansial langsung kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan. Hal ini dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari yang penting, seperti makanan, perawatan kesehatan, dan pendidikan anak-anak. Selain itu, Program Bansos Tunai juga dapat membantu masyarakat dan pegawai mengatasi ketidakpastian ekonomi yang dihadapi selama pandemi. Dengan adanya bantuan tunai, mereka memiliki sedikit kepastian finansial dalam menghadapi situasi sulit ini. Bantuan ini dapat membantu meringankan beban keuangan dan memberikan jaminan sementara untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Selanjutnya, Program Bansos Tunai juga memiliki efek stimulus terhadap perekonomian. Ketika bantuan tunai diberikan kepada masyarakat, mereka memiliki daya beli yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan mereka. Hal ini dapat memberikan dampak positif pada sektor ekonomi lokal, seperti peningkatan permintaan barang dan jasa, serta membantu menjaga kelangsungan usaha bagi pelaku bisnis yang terdampak.

Namun, penting juga untuk mencatat bahwa Program Bansos Tunai memiliki tantangan

dan perlu terus ditingkatkan. Salah satunya adalah menjangkau keluarga-keluarga yang benar-benar membutuhkan bantuan tersebut. Ada kemungkinan bahwa beberapa keluarga yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak terdaftar atau tidak tercakup dalam program BLT, sementara keluarga-keluarga lain yang seharusnya tidak memenuhi syarat mendapatkan bantuan.

Ketika penyaluran BLT tidak dilakukan dengan transparan, ada risiko terjadinya penyalahgunaan dana atau kecurangan. Misalnya, ada kemungkinan bahwa bantuan tersebut tidak sampai kepada penerima yang seharusnya, atau terdapat penerima ganda yang memanfaatkan celah dalam sistem untuk mendapatkan bantuan secara tidak sah.

Kurangnya mekanisme pemantauan yang efektif dan evaluasi yang memadai menyebabkan sulitnya melacak penggunaan dana, mengidentifikasi pelanggaran, atau mengukur dampak nyata dari program tersebut.

Untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program BLT, beberapa langkah-langkah yang dapat direkomendasikan adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan kriteria penerima yang jelas: Penting untuk memiliki kriteria yang jelas dan terukur dalam menentukan keluarga-keluarga yang memenuhi syarat untuk menerima bantuan. Kriteria ini harus mempertimbangkan dampak ekonomi langsung akibat pandemi serta kondisi sosial dan ekonomi secara keseluruhan.

Dalam berita Berau Post, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Iswahyudi menjelaskan bahwa terdapat perbedaan dalam jumlah indikator yang digunakan untuk mengukur kemiskinan di Berau. Menurut Iswahyudi, ada 20 indikator yang digunakan oleh pihaknya untuk mengukur kemiskinan di wilayah tersebut. Namun, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan 14 indikator untuk mengidentifikasi masyarakat yang berada dalam kondisi miskin.

Indikator kemiskinan yang digunakan oleh BPS meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat yang menunjukkan kondisi ekonomi yang rendah. Beberapa indikator tersebut antara lain adalah luas bangunan tempat tinggal yang kurang dari 8 meter persegi, jenis lantai atau tempat tinggal yang terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan, serta jenis dinding tempat tinggal yang menggunakan bahan seperti bambu, rumbia, kayu berkualitas rendah, atau tembok tanpa diplester. Selain itu, indikator lainnya meliputi ketersediaan fasilitas air bersih, sumber penerangan yang tidak menggunakan listrik, sumber air minum yang berasal dari sumur, dan bahan bakar untuk memasak yang menggunakan kayu bakar atau minyak tanah. Indikator lainnya mencakup aspek konsumsi makanan, seperti frekuensi konsumsi daging atau ayam dalam seminggu, kemampuan untuk membeli pakaian baru, frekuensi makan sehari, serta kemampuan untuk membayar biaya pengobatan di puskesmas dan poliklinik. Indikator-indikator lainnya termasuk sumber penghasilan kepala rumah tangga, tingkat pendidikan kepala rumah tangga, serta kepemilikan tabungan atau barang yang dapat dijual dengan harga minimal Rp 500 ribu.

Perbedaan jumlah indikator yang digunakan oleh Dinsos dan BPS menunjukkan perbedaan pendekatan dalam mengukur kemiskinan. Meskipun demikian, kedua indikator tersebut tetap bertujuan untuk mengidentifikasi masyarakat yang membutuhkan bantuan dan perlindungan sosial selama pandemi.

Dalam konteks penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT), pemahaman dan penerapan indikator yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan diberikan kepada keluarga-keluarga yang memang secara ekonomi terdampak dan membutuhkan bantuan tersebut. Transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program BLT juga perlu diperhatikan untuk menghindari penyalahgunaan dan memastikan bahwa bantuan yang diberikan tepat sasaran.

2. Pemetaan data dan validasi terhadap penerima: Pemerintah harus melakukan pemetaan data secara akurat dan validasi terhadap calon penerima bantuan. Hal ini dapat dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga terkait, seperti Badan Pusat Statistik (BPS), untuk memastikan bahwa data yang digunakan adalah data yang valid dan terkini.
3. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas: Pemerintah perlu meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan program BLT, termasuk dalam mekanisme seleksi penerima, proses penyaluran, dan laporan penggunaan dana. Informasi ini harus dapat diakses secara publik untuk memastikan adanya akuntabilitas.
4. Penguatan sistem pemantauan dan evaluasi: Diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi yang kuat untuk melacak penggunaan dana dan dampak program. Hal ini meliputi pemeriksaan lapangan, audit independen, dan penggunaan teknologi untuk mempercepat pelaporan dan pemantauan.
5. Edukasi dan partisipasi masyarakat: Masyarakat perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang program BLT, termasuk kriteria, proses seleksi, dan hak serta kewajiban penerima. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan juga harus didorong untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik.

Respon masyarakat terhadap program BLT dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, seperti pemahaman mereka tentang program, kejelasan kriteria, kemudahan akses, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Beberapa contoh respon masyarakat terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) antara lain:

1. Apresiasi terhadap bantuan yang diberikan: Banyak masyarakat yang merasa terbantu dan mengapresiasi upaya pemerintah dalam memberikan bantuan tunai. Bantuan ini dianggap sebagai bentuk perhatian dan respons pemerintah terhadap kesulitan ekonomi yang dihadapi selama pandemi.
2. Keluhan terkait keterlambatan dan ketidakmerataan: Beberapa masyarakat mengungkapkan keluhan terkait keterlambatan penyaluran bantuan dan ketidakmerataan dalam distribusi. Keluhan ini seringkali terkait dengan kecemasan terhadap kondisi ekonomi yang semakin sulit dan perlunya bantuan segera.
3. Permintaan transparansi dan akuntabilitas: Masyarakat juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program. Mereka menginginkan informasi yang jelas mengenai seleksi penerima, proses penyaluran, dan laporan penggunaan dana agar dapat mengawasi pelaksanaan program secara efektif.
4. Ajakan untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan: Beberapa masyarakat mungkin mengungkapkan ajakan untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan dan pelaporan terkait program BLT. Masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai "mata dan telinga" dalam memastikan program tersebut berjalan dengan baik dan tepat sasaran.

Setelah melakukan wawancara online dengan lima masyarakat yang menjadi informan, peneliti mendapatkan hasil berikut:

1. Informan pertama adalah Hartati, seorang ibu rumah tangga berusia 35 tahun yang suaminya bekerja sebagai buruh lepas. Hartati berasal dari kelurahan Gunung Tabur. Menurutnya, pendataan warga yang berhak mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dianggap tidak maksimal. Meskipun sebelumnya dirinya selalu menjadi penerima bantuan dalam program bantuan pemerintah, kali ini dirinya dan beberapa warga lain di RT 15 tidak termasuk sebagai penerima. Hartati memberikan saran agar pemerintah tidak hanya mengandalkan

- data dari RT/RW setempat, tetapi diharapkan petugas dari kecamatan yang dapat melihat kondisi masyarakat secara langsung di lapangan.
2. Informan kedua adalah Siti, seorang buruh harian lepas berusia 40 tahun yang tinggal di kelurahan Gunung Tabur. Siti mengungkapkan kekecewaannya karena tidak masuk dalam daftar penerima BLT, padahal dirinya sangat membutuhkan bantuan tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, sistem pendataan harus lebih akurat dan mengikutsertakan semua warga yang memang membutuhkan. Siti merekomendasikan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat agar bantuan tepat sasaran.
 3. Informan ketiga adalah Bambang, seorang buruh tani berusia 50 tahun yang tinggal di kelurahan Gunung Tabur. Bambang mengungkapkan bahwa dia tidak mengetahui secara pasti kriteria yang digunakan dalam penyaluran BLT. Menurutnya, informasi yang diberikan oleh pemerintah kurang jelas dan terkadang menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Bambang menyarankan agar pemerintah menyediakan sumber informasi yang lebih terbuka dan mudah diakses agar masyarakat dapat memahami prosedur dan kriteria yang berlaku.
 4. Informan keempat adalah Dewi, seorang ibu tunggal berusia 30 tahun yang memiliki anak usia balita. Dewi merasakan dampak yang signifikan akibat pandemi, terutama dalam hal kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Dia mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diterimanya melalui program BLT. Dewi berpendapat bahwa program ini sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan dasar keluarganya, terutama dalam membeli makanan dan memenuhi kebutuhan anaknya. Dia berharap bantuan ini dapat terus berlanjut selama masa pemulihan ekonomi pasca pandemi.
 5. Informan kelima adalah Rudi, seorang ayah dengan dua anak yang masih bersekolah. Rudi kehilangan pekerjaannya sebagai sopir angkutan umum sejak pandemi dimulai. Dia mengungkapkan rasa putus asa karena sulitnya mencari pekerjaan baru yang sesuai dengan keahliannya. Rudi menyambut baik program BLT sebagai bantuan yang sangat dibutuhkan oleh keluarganya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat terkait penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) selama pandemi COVID-19, beberapa respon negatif timbul yang memunculkan keraguan akan efektivitas program tersebut. Salah satu respon yang diungkapkan adalah ketidakmaksimalan pendataan warga yang berhak menerima BLT. Beberapa informan merasa kecewa karena tidak masuk dalam daftar penerima, padahal mereka memenuhi kriteria sebagai masyarakat yang terdampak dan membutuhkan bantuan tersebut. Hal ini menunjukkan perlunya penyempurnaan dan peningkatan akurasi dalam proses pendataan agar bantuan tepat sasaran.

Selain itu, beberapa informan juga mengungkapkan ketidakjelasan informasi terkait kriteria dan prosedur penyaluran BLT. Mereka merasa bahwa informasi yang diberikan oleh pemerintah kurang jelas dan terkadang membingungkan. Hal ini menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat yang membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, peningkatan transparansi dan keterbukaan dalam menyediakan informasi mengenai program bantuan sangat penting agar masyarakat dapat memahami dengan jelas proses dan persyaratan yang berlaku.

Berdasarkan pengalaman dan pandangan informan, peneliti merekomendasikan beberapa langkah untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program BLT. Pertama, meningkatkan koordinasi antara tingkat RT/RW dan tingkat kecamatan dalam proses pendataan. Dengan demikian, data yang terkumpul dapat diverifikasi dengan lebih akurat dan memastikan bantuan tepat sasaran. Kedua, diperlukan perbaikan dalam mekanisme pengawasan agar penyaluran bantuan dapat diawasi dengan lebih baik dan mencegah terjadinya

penyalahgunaan. Ketiga, penting untuk meningkatkan akurasi dan kejelasan informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait persyaratan, jadwal penyaluran, dan mekanisme pengajuan keluhan atau pertanyaan terkait program BLT. Terakhir, memastikan bahwa sumber informasi yang mudah diakses dan dapat dipahami oleh semua pihak, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi yang mereka butuhkan secara cepat dan efisien.

Perlu adanya mekanisme yang efektif dalam mengidentifikasi dan memastikan bahwa bantuan tunai benar-benar diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Selain itu, penting juga untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini. Pemerintah perlu melakukan pemantauan yang ketat untuk memastikan bahwa bantuan tunai benar-benar digunakan sesuai dengan tujuan dan tidak disalahgunakan.

Secara keseluruhan, Program Bansos Tunai merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam memberikan bantuan kepada masyarakat dan pegawai yang terdampak pada saat pandemi. Bantuan tunai ini diharapkan dapat memberikan dukungan finansial yang penting, mengurangi beban ekonomi, dan memberikan stimulus bagi perekonomian. Namun, perlu adanya langkah-langkah yang tepat untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program ini guna memberikan dampak yang maksimal bagi masyarakat dan pegawai yang membutuhkan.

KESIMPULAN

Sebagai bentuk respon terhadap pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terdampak. Bantuan ini diberikan untuk membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari yang mungkin terganggu akibat situasi ekonomi yang sulit akibat pandemi. Namun, dalam penelitian yang dilakukan di Kelurahan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, ditemukan bahwa pembagian BLT tidak merata. Beberapa warga yang seharusnya masuk dalam kategori penerima bantuan tidak termasuk dalam daftar penerima, meskipun sebelumnya mereka telah menerima bantuan dari program pemerintah lainnya.

Program BLT sebenarnya bertujuan untuk membantu masyarakat miskin dan sebagai salah satu upaya dalam pemberantasan kemiskinan di Indonesia. Namun, program ini memiliki beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Salah satunya adalah validitas data masyarakat miskin yang sering diragukan dan seringkali dipalsukan. Hal ini mengakibatkan bantuan yang seharusnya diterima oleh masyarakat miskin justru diterima oleh orang yang sebenarnya tidak memenuhi kriteria. Selain itu, adanya penilaian bahwa BLT tidak tepat sasaran juga menjadi masalah. Beberapa masyarakat beranggapan bahwa hanya sebagian kecil dari mereka yang mendapatkan bantuan tersebut. Hal ini mungkin dikarenakan keterbatasan anggaran dan proses pendataan yang tidak maksimal.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dampak pandemi COVID-19, baik dari segi kesehatan maupun ekonomi. Regulasi seperti Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM) diterapkan untuk mengendalikan penyebaran virus. Pemerintah juga mengeluarkan kebijakan stimulus ekonomi, seperti bantuan langsung tunai dan relaksasi pajak, untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Meskipun demikian, masih ada tantangan dalam implementasi program-program tersebut. Diperlukan evaluasi dan penyesuaian kebijakan yang sesuai dengan perkembangan situasi pandemi guna mencapai keseimbangan antara kesehatan dan kelangsungan industri. Pemerintah juga perlu memperbaiki validitas data masyarakat yang menerima bantuan agar bantuan yang diberikan tepat sasaran dan efektif dalam memberikan dukungan kepada yang membutuhkan.

DATAR REFERENSI

- Ahmad Hamzah, Dhea Adelia Anggraeni, Maulida Luthfiah Hanum, Putri Ayu Listiyaningrum, & Dwi Urip Wardoyo. (2023, ULIL ALBAB). Analisis Manajemen Risiko di Masa Pandemi Covid-19 pada Perekonomian Indonesia. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 2(3), 1050–1055. <https://doi.org/10.56799/jim.v2i3.1373>
- Fidyatun, Erna. 2011. Evaluasi Program Keluarga Harapan (PKH) Bidang Kesehatan di Kab. Brebes. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*. 1(2): 2-3
- Iping, B. (2020). Perlindungan sosial melalui kebijakan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan perspektif ekonomi dan sosial. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*. 1(2), 516-526.
- Rakhmat Djalaludin. (1999). *Psikolog Komunikasi*. Remaja Rosda karya. Bandung.
- Murti, G. T., Nazar, M. R., & Wardoyo, D. U. (2022). Pendampingan UMKM Dalam Melakukan Pembentukan Badan Usaha Melalui Pendanaan Lembaga Keuangan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 1(4), 54-59.
- Nyoman, Sumaryadi, I. (2010). *Sosiologi Pemerintahan; Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- R Berau. (2022). *Pembagian BLT Dianggap Tak Merata, Pemkab Alasan Pendataan Langsung dari Kemensos*. Retrieved Juni 2023, from BERAU POST: <https://berau.prokal.co/read/news/71875-pembagian-blt-dianggap-tak-merata-pemkab-alasan-pendataan-langsung-dari-kemensos.html>
- Selviana, Akib, I., & Risfaisal. (2016, November 2). Bantuan Langsung Tunai. *Jurnal Equilibrium, Volume III No. 2*. <https://journal.unismuh.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/283/425>
- Suherman, A. (2020). *Buku Ajar Teori - Teori Komunikasi*. Deepublish Publisher. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=dn_sDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=proses+awal+komunikasi&ots=29essEmjnM&sig=gqryc34eQLa8Cu708iWD8ObAwU0&redir_esc=y#v=onepage&q=proses%20awal%20komunikasi&f=false
- WARDOYO, D. U. ., Rachma, A. A. ., DWI N, A. I. ., & HANIF, A. . (2022). ANALISA AKUNTABILITAS BELANJA HIBAH PADA PEMERINTAHAN KOTA YOGYAKARTA . *Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Kewirausahaan*, 2(2), 1–10. Retrieved from <http://ejurnal.politeknikpratama.ac.id/index.php/JUMBIKU/article/view/243>
- World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Geneva: World Health Organization; 2020.